PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN SUKOMORO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT. atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukomoro Tahun 2025. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2025 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Sukomoro Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Sukomoro dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Sukomoro Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran , masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Sukomoro, 26 Januari 2026

CAMAT SUKOMORO



WISNU ANANG PRABOWO, SP
Pembina Tingkat I
NIP. 19800130 200312 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum/Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
1.4 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi
1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Ikhtisar / Ringkasan Renstra / Renja
2.2 Perjanjian Kinerja Pada Tahun Yang Bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

A.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional / Provinsi / Kabupaten yang berbatasan)

A.5 Analis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

A.6 Analis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A.7 Analis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)
4. Bukti dukung kinerja lainnya yang mendukung tercapainya kinerja / outcome OPD baik pada level Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM/LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *good govermance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatuperencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintahyang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Sukomoro Tahun 2025 yang diharapkan dapat

memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan SukomoroKabupaten Nganjukbagi Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholder).*

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Sukomoro merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerimamandat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
b) Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan;
c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

1.3 LANDASAN HUKUM

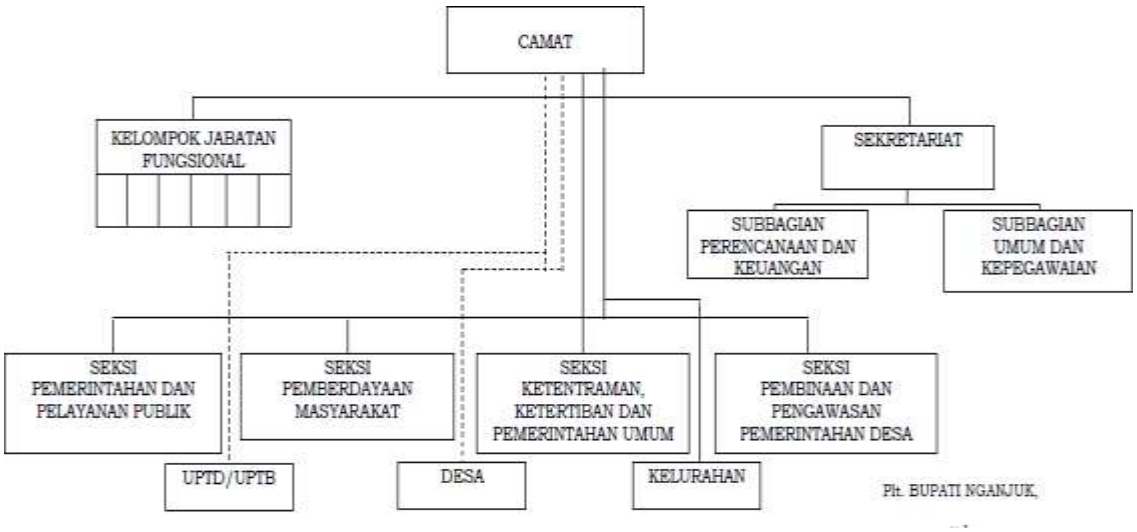
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta TataKerja Dinas Perhubungan;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029; dan
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

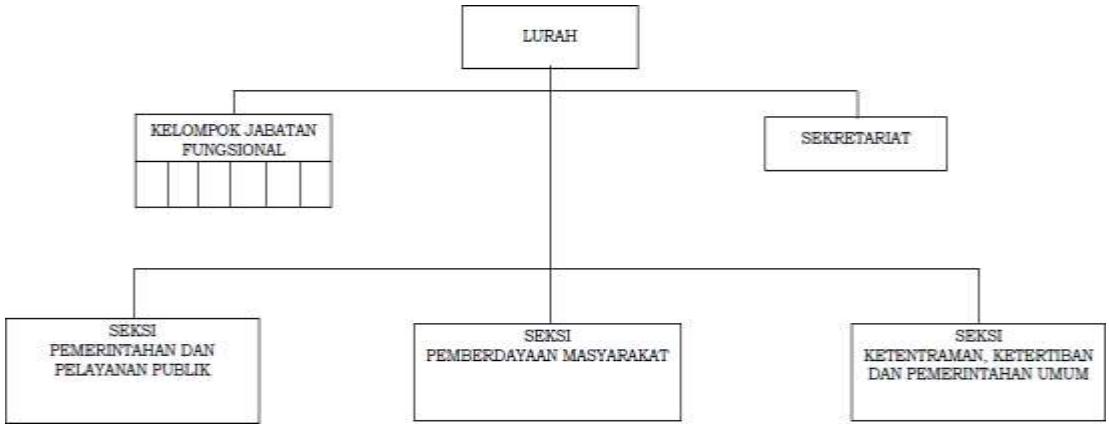
1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Sukomoro. Struktur Organisasi Kecamatan Sukomoro dan Kelurahan (KAPAS dan SUKOMORO) yang ada di Kecamatan Sukomoro adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN SUKOMORO DAN KAPAS
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK



Struktur Organisasi Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4. 4 (empat) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Selksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Struktur Organisasi yang ada pada 2 Kelurahan di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk terdiri dari :

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan
3. 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum

1.3.2 TUGAS DAN FUNGSI

Untuk Tugas Pokok dan Fungsi dari Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
j. Kelurahan

   Untuk Kecamatan Sukomoro mempunyai 2 Kelurahan yang sangat menentukan kondisi untuk kelancarkan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan masing - masing.

Kelurahan

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai fungsi yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
5. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketatausahaan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di kelurahan;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas :

1. melaksanakan kegiatan pemerintahan;
2. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
3. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
4. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non pertanian; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan

lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;

2. melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang di wilayah kerja kelurahan;
3. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
4. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan;
5. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

1. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keiutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kelurahan;
3. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mel;aksanakan pembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
6. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-iundangan;

7. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
8. melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan Pemilihan Umum (Pemilu) serta pembinaan Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW); dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat di Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan Tugas Pokok Camat adalah :

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Sedangkan Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;

i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. Melaksanakan evaluasi kelurahan; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

b. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan , regional dan nasional;
h. Melaksanakan penanganan konfliksesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangandaerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaanaset desa;
d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. Melaksanakan fasilitasi penetapanpembangunan kawasan perdesaan;
j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Sukomoro adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 1.1

Pegawai Pada Kecamatan Sukomoro

Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	0	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	0	1
3	Lurah	0	2	2
4	Kepala Seksi	7	1	8
5	Sekkel	1	1	2
6	Kasubbag	0	2	2
7	Pelaksana/PNS	12	1	13
Jumlah				29

b) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Sukomoro sebagai berikut :

Tabel 1.2

Pegawai Pada Kecamatan Sukomoro
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1	0	1
2.	Penata Tingkat I	III/d	5	3	8
3.	Penata	III/c	2	2	4
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	1	2
5.	Penata Muda	III/a	5	0	5
6.	Pengatur Tk.I	II/d	1	0	1
Jumlah					21

c) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Sukomoro dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 1.3

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sukomoro
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	0	1	1
2.	S1	10	5	15
3.	D3	0	0	0
4.	SMA	5	0	5
	Jumlah			21

1.5 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Isu-isu strategis Kecamatan Sukomoro yaitu :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan nonpemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- **1.1. Gambaran Umum/Latar Belakang;**
- **1.2. Landasan Hukum;**
- **1.3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi;**
- **1.4. Isu – Isu Strategis yang sedang dihadapi Organisasi;**
- **1.5. Sistematika Penulisan.**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- **2.1. Ikhtisar /Ringkasan Renstra/Renja; dan**
- **2.2. Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- **3.1. Capaian Kinerja Organisasi;**
  - **A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025;**
  - **A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2025 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya;**
  - **A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra;**
  - **A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional;**
  - **A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja;**
  - **A.6 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya;**
  - **A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**
- **3.2. Realisasi Anggaran.**

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 IKHTISAR /RINGKASAN RENSTRA/RENJA

Rencana Strategis pemerintah Kecamatan Sukomoro merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 periode 4 dari RPJPD 2005-2025. Tujuan RPJMD tersebut adalah Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang maju, adil, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif yang didukung sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Sedangkan untuk Pemerintahan Kecamatan Sukomoro akan menuangkan tujuan RPJMD tersebut dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Adapun Tujuan Kecamatan Sukomoro adalah Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 mempunyai sasaran strategis :

a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan
   Indikator : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Sukomoro (Renstra 2024-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	88 Nilai
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	9 %

Sunber : RPD 2024-2026

Ikhtisar Perencanaan Kinerja Berbasis RPJMD 2025-2029

Memasuki tahun pertama RPJMD, perencanaan kinerja tahun 2025 diperlakukan sebagai tahapan awal dan arah kebijakan, bukan sebagai targetpuncak.

A. Sasaran Strategis Awal RPJMD Sasaran strategis awal diletakkan pada “Transformasi Tata Kelola dan Insfrastruktur Ekonomi”. Fokusnya adalah penguatansistem digital pemerintahan (SPBE) dan optimalisasi Kawasan Industri Nganjuk (KING) sebagai penarik investasi masa depan.
B. Indikator Fondasi (Basline dan Early Achievement) Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur kekuatan awal (starting point) bagi kepemimpinan 5 (lima) tahun ke depan :
    - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : Dijadikan baseline untuk melihat sejauh mana responsivitas layanan publik diawal periode.
    - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : Menjadi anglka fondasi untuk mengevaluasi efektivitas kemudahan investasi dan pelatihan kerja ke depan.
    - Digitalisasi Desa : Menilai persentase desa yang sudah siap secara administrasidigital sebagai fondasi Smart Village.

Perencanaan Kinerja Berbasis RPJMD 2025-2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Camat Sukomoro Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (RPJMD 2025-2029) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukomoro adalah ; “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel”.

Rumusan visi yang ditetapkan dapat ditelaah sebagai berikut :

Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan, yang diukur dengan indikator dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks SinergitasPenyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

b. Misi.

Misi dalam RPJMD 2025-2029 yang akan ditunjang realisasinya dalam Tujuan Rumusan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk adalah Sasaran 3 (tiga) yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik di Kecamatan
   Indikator : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan
   Indikator : Persentase penurunan pelanggaran ketentramnan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa
   Indikator : Persentase Desa tertib Administrasi Desa

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dalam target kinerja untuk tahun 2025 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.2
Perubahan perjanjian Kinerja kecamatan Sukomoro 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sukomoro	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Sukomoro	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	4 %
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Sukomoro	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	82 %

Sunber : Rpjmd 2025-2029

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukomoro merupakan Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen Renstra SKPD dan RPD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaranstrategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan

Sukomoro Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk 2024-2026 dengan mengambil target tahun 2025. Penuntasan Sasaran 2024-2026 dan untuk memastikan pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, meletakkan dasar teknokratis, isu-isu strategis dan indikator kunci (IKU/IKK) yang selaras dengan mengsinkronisasi arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 untuk mencapai target indikator kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel guna mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

2.2 PERJANJIAN KINERJA PADA TAHUN YANG BERSANGKUTAN

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukomoro 2025 disusun berdasar RPD Tahun 2024-2026 berdasar Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{RealisasiESukma}}{\text{Target}} \text{ x100 \%}$$

2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlahlaporanpelanggarantrantibum ThN-1dikurangi Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N}}{\text{Jumlahlaporan pelanggarantrantibum Th N-1}} \text{ x100 \%}$$

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89 Nilai
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	9 %

Sunber : RPD 2024-2026

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukomoro Tahun 2025 disusun berdasar RPJMD 2025-2029 berdasar Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Nilai IKM Realisasi Tahun 2025}}{\text{Target IKM Tahun 2025}} \times 100\ \%$$

2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{JumlahlaporanpelanggarantrantibumThN-1dikurangi Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N}}{\text{Jumlahlaporan pelanggarantrantibum Th N-1}} \times 100\ \%$$

3. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah Desa dengan administrasi tertib}}{\text{Total jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\ \%$$

Tabel 2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukomoro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sukomoro	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Sukomoro	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	4 %
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Sukomoro	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	82 %

Sunber : Rpjmd 2025-2029

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukomoro merupakan perwujudan kewajiban KecamatanSukomorountuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan SukomoroTahun2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan persyaratan mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plant) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Sukomoro menetapkan kriteria ketercapaian sasaran strategis perangkat daerah dengan interval nilai capaian sebagai berikut :

No	Interval Nilai Capaian	Kriteria
I	≥ 91 %	Tercapai
II	80 % ≤ 90 %	Tercapai dengan catatan
III	< 80 %	Tidak tercapai

Capaian Kinerja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunini, antara

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yangmenunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sedangkan Pengukuran Kinerja Sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

TABEL 3.1.1
REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	88 Nilai	94,98*	107,93%
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	9 %	71,42 %**	793,55%
Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	82,7 Nilai	92,31	111,62%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Renstra 2025-2029	87 Nilai	95,92	110,25%
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Renstra 2025-2029	4 %	42,85%	1071,25%
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	82 %	90,00%	109,75%

Berdasarkan data pada Tabel 3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2025, berikut adalah analisis mendalam mengenai capaian kinerja organisasi tersebut. Analisis ini membagi evaluasi menjadi 2 (dua) perspektif perencanaan, yaitu berdasarkan RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029.

1. Analisis Capaian BerdasarkanRPD 2024-2026

   Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

   - Target: 88 Nilai
   - Realisasi: 94,98
   - Persentase Capaian: 107,93%
   - Analisa:
     - ❖ Kinerja Sangat Berhasil: Capaian di atas 100%, (107,93%) menunjukkan bahwa kinerja pelayanan PATEN melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen RPD/Renstra 2024-2026.
     - ❖ Kualitas Pelayanan: Skor IKM 94,98 masuk dalam kategori “Sangat Baik”/ Tercapai (skala 0-100 atau konversi ke 1-4). Ini dikarenakan adanya efisiensi prosedur, kecepatan waktu, dan keramahan petugas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
     - ❖ Faktor Keberhasilan: Karena adanya perbaikan sarana prasarana, penyederhanaan birokrasi, atau digitalisasi layanan tingkat kecamatan selama periode tersebut.
     - ❖ Pada segmen ini, kinerja menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi semua mencapai 100%

       Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Indikator sasaran mencapai angka 107,93%, hal ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan sudah sangat stabil dengan target yang sangat baik. Selisih angka riil (94,98dari target 88) yang menandakan manajemen operasional di Kecamatan sudah berjalan sesuai riil. Berikut unsur penilaian E_sukma Jatim :

       1. Persyaratan
       2. Sistem,Mekanisme dan Prosedur
       3. Waktu Penyelesaian
       4. Biaya / Tarif
       5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
       6. Kompetensi Pelaksanaan
       7. Perilaku Pelaksanaan
       8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

9. Sarana dan Prasarana

2. Analisa Capaian Pelayanan Publik (Renstra 2025-2029)
   - Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan.
   - Target: 87 Nilai
   - Realisasi: 95,92
   - Persentase Capaian: 110,25%
   - Analisa:
     - Kinerja Sangat Baik: Capaian 110,25% menunjukkan komitmen yang sangat kuat dan berkelanjutan dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan.
     - Tren Peningkatan: Nilai IKM 95,92 bahkan lebih tinggi dari capaian periode sebelumnya (93,50), menunjukkan peningkatan kualitas yang berkelanjutan (*continuous improvement*).
     - Kategori Kinerja: Nilai ini menunjukkan pelayanan sudah mendekati prima, di mana harapan masyarakat sudah terpenuhi, bahkan terlampaui.

3. Analisa Capaian Kinerja Renstra 2024-2026 (RPD)
   - Indikator: Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban Umum.
   - Target: 9%
   - Realisasi: 71,42 % (capaian 793,55 % adalah karena adanya kesalahan pada awal perencanaan)
   - Analisa:
     - Catatan: Capaian di atas 793,55%, hal ini dikarenakan ada kesalahan pada awalperencanaan.
     - Faktor Pendorong: Adanya perbaikan sistem koordinasi penegakan Perda, peningkatan patroli bersama Polsek/Koramil, atau partisipasi aktif masyarakat dalam pengamanan swakarsa (Siskamling) yang tidak terprediksi sebelumnya.

4. Analisa Capaian Kinerja Renstra 2025-2029 (RPJMD)

- Indikator: Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum.
- Target: 4%
- Realisasi: 42,85%
- Persentase Capaian : 1071,25 %
- Analisa:
  - ❖ Catatan: Realisasi 42,85% (1071,25 %)terjadikarena target yang ditetapkan (4%) pada dokumen perencanaan 2025-2029 terlalu rendah.
  - ❖ Faktor Pendorong: Mungkin terdapat inovasi baru dalam penanganan ketertiban, seperti penggunaan aplikasi laporan cepat atau respon tanggap darurat yang lebih efisien dari Trantibum Kecamatan.
  - ❖ Evaluasi Target: Target (9% dan 4%) terlalu rendah dibandingkan kemampuan realisasi. Tingkatkan Target: Dalam Renstra 2025-2029 (RPJMD) yang baru, target penurunan (persentase) harus ditingkatkan secarasignifikan untuk mencerminkan realisasi yang sebenarnya (misalnya di atas 50-100%).Pertahankan Metode: Metode yang digunakan dalam mencapai penurunan gangguan ketertiban perlu dipertahankan dan ditingkatkan.Dikarenakan ada kesalahan pada awal perencanaan.(Target terlalu rendah)

5. Analisa Capaian Kinerja: Indeks Sinergitas Kecamatan Renstra 2025-2029 (RPJMD)
   - Indikator: Indeks Sinergitas Kecamatan (Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan)
   - Target Renstra 2025-2029 (Akhir/Target): 82,7 Nilai
   - Capaian Awal/Baselines (RPD 2024-2026): 92,31
   - Rasio Capaian : 111,62%

   1. Analisa Kuantitatif

      Dengan mencapai angka 111,62% terhadap target, ini menunjukkan kinerja sangat tinggi/melampaui target (overachieved). Indeks yang meningkat dari 82,7 menjadi 92,31 (asumsi peningkatan dalam periode perencanaan) menunjukkan adanya penguatan sinergi yang signifikan.

   2. Interpretasi Kinerja (Meningkatnya Sinergitas)

Nilai indeks 92,31 (mendekati 100) menunjukkan bahwa kecamatan telah berhasil (Tercapai) :

- Konsolidasi Internal: Meningkatkan koordinasi antara perangkat kecamatan, kelurahan/desa, dan instansi vertikal di tingkat kecamatan.
- Pelayanan Terpadu: Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, mengurangi ego sektoral dalam pelayanan publik.
- Kesesuaian RPD-RPJMD: Renstra Kecamatan telah selaras dengan arah kebijakan RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029, di mana kecamatan berperan sebagai ujung tombak pelayanan.

6. Analisa Capaian Kinerja Tertib Administrasi Desa Renstra 2025-2029 (RPJMD)

- Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2025-2029 menetapkan target pada sasaran: *"Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa"*. Salah satu indikator utama untuk mengukur sasaran ini adalah Persentase Desa dengan Administrasi Tertib.di Tri Bulan IV pada Tahun 2025 masuk dalam sasaran Strategis.
  - Target Tahun 2025: 82%
  - Realisasi Tahun 2025: 90,00% (9 Desa dari 10 Desa)
- Analisis Capaian Kinerja:

  Berdasarkan data operasional tahun 2025, realisasi capaian kinerja tertib administrasi desa mencapai 90,00%. Angka ini diperoleh dari 9 desa yang telah memenuhi kriteria administrasi tertib (meliputi penatausahaan keuangan, dokumen perencanaan desa, dan pelaporan) dari total 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Sukomoro.
- Dengan target 82%, realisasi 90,00% menunjukkan capaian kinerja melampaui target.Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh:
  1. Monitoring Rutin Monev : Kecamatan intensif melaksanakan evaluasi triwulanan terhadap dokumen administrasi desa.
  2. Pendampingan Intensif: Melakukan pendampingan langsung oleh Kasi Pemerintahan ke desa-desa yang memiliki kendala dalam penatausahaan.

3. Digitalisasi: Mulai diterapkannya sistempelaporan berbasis digital di 90% desa.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja
Berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

NO	Tujuan /Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Renstra 2024-2026	86,28	86	87	88	85	86,5	91,66	94,98
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Renstra 2024-2026	12	9	9	9	8	5	7	71,42%
3	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	N/A	N/A	N/A	82,7	68,24	84,49	79,83	92,31
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Renstra 2025-2029	86,28	86	87	87	85	86,5	91,66	95,92
5	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Renstra 2025-2029	12%	9%	9%	4%	8	5	7	42,85%
6	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	N/A	N/A	N/A	82	N/A	N/A	N/A	90,00%

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa :

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

Sasaran Kinerja 1 (satu) Meningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

- Renstra 2024-2026: Fokus pada pemenuhan standar pelayanan dasar, penyederhanaan prosedur administratif, dan peningkatan kompetensi petugas PATEN. Realisasi kinerjanya sering kali menitikberatkan pada kecepatan penyelesaian dokumen dan transparansi biaya.
- Renstra 2025-2029: Fokus bergeser pada digitalisasi total, integrasi sistem (online), dan proaktif dalam pelayanan. Arah kebijakan menekankan penggunaan teknologi informasi yang lebih masif untuk mempercepat layanan dan mempermudah akses masyarakat, serta integrasi data dengan instansi terkait.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PATEN
  a. Renstra 2024-2026: Target IKM umumnya berada di kisaran “Baik” hingga “Sangat Baik” (skala 80-90). Realisasi kinerja pada periode ini seringkali menargetkan perbaikan pelayanan dari level menengah ke atas.
  b. Renstra 2025-2029: Target IKM dinaikkan menjadi “Sangat Baik” secara konsisten, bahkan sering mematok nilai di atas 90. Penekanan realisasi bukan hanya pada kepuasan administratif, tetapi juga kepuasan atas kecepatan dan kemudahan (aspek waktu dan kenyamanan).

Tabel Perbandingan Arah Kebijakan PATEN		
Komponen	Renstra 2024-2026	Renstra 2025-2029
Fokus Utama	Standarisasi dan Efisiensi	Digitalisasi dan Integrasi
Realisasi Kinerja	Penyederhanaan Prosedur	Automasi Pelayanan
Target IKM	Baik - Sangat Baik	Sangat Baik (Prediksi A)
Karakteristik	Konvensional + Online Terbatas	Berbasis Digital dan Mobile

- Tantangan dan Perbaikan Berkelanjutan

  Realisasi pada kedua periode menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan PATEN memerlukan:

  1. Evaluasi berkala: Pelaksanaan survei IKM rutin untuk mengukur perubahan perilaku kebutuhan masyarakat.

     Inovasi: Penambahan inovasi pelayanan untuk mempercepat waktu pelayanan (unsur waktu dalam IKM).

2. Penguatan SDM: Peningkatan kompetensi ASN dalam pelayanan publik yang ramah dan cepat.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

Sasaran Kinerja 2 (dua) Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.

- Fokus Renstra 2024-2026
  1. Karakteristik: Fokus pada penguatan dasar pelayanan publik dan penyesuaian target akibat dinamika daerah, seringkali berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) transisi.
  2. Target: Biasanya menetapkan penurunan angka pelanggaran trantibum secara moderat, dengan penekanan pada tindakan preventif dan patroli rutin.
  3. Realisasi: Banyak kecamatan menetapkan persentase pencapaian kinerja (misalnya, koordinasi trantibum) mencapai 100% pada tahun 2023-2024.
  4. Isu: Penyesuaian target sering dilakukan akibat perubahan kepala daerah atau adanya evaluasi kinerja 2020-2024.
- Fokus Renstra 2025-2029
  1. Karakteristik: Disusun berdasarkan RPJMD baru hasil Pilkada 2024, berfokus pada visi jangka menengah, terintegrasi dengan isu strategis seperti SDG's (TPB) dan visi Indonesia Emas 2045.
  2. Target: Lebih terukur dan ambisius, menetapkan target penurunan pelanggaran Trantibum yang lebih agresif melalui penguatan fungsi Polisi Pamong Praja di tingkat kecamatan.
  3. Indikator: Menggunakan indikator kinerja utama (IKU) yang mencakup:
     a. Persentase penurunan pelanggaran trantibum umum.
     b. Persentase peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada.
     c. Kecepatan respon penanganan gangguan Trantibum.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja		
Komponen	Renstra 2024-2026	Renstra 2025-2029
Dasar Pedoman	RPD (Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2025-2029
Kontek	Pemulihan & Penyesuaian	Peningkatan & Keberlanjutan

Fokus Trantibum	Patroli rutin & Fasilitasi	Penegakan Perda &Pencegahan Proaktif
Target Penurunan Pelanggaran	Moderat (Sesuai kondisi)	Lebih Tinggi & Spesifik

Realisasi Penurunan Pelanggaran pada Renstra 2025-2029 umumnya diharapkan lebih tinggi dalam menurunkan persentase pelanggaran Trantibum dibandingkan 2024-2026. Hal ini dikarenakan 2025-2029 merupakan jabaran langsung dari visi-misi kepala daerah baru yang menuntut peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui situasi wilayah yang lebih kondusif dan tertib.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

Sasaran kinerja yang ke 3 (tiga) Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan

- Renstra 2024-2026: Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Kecamatan pada Tahun 2025 di Tri Bulan I sampai dengan Tri Bulan III belum menjadi Sasaran Kinerja.
- Renstra 2025-2029: Menjadi Sasaran Kinerja pada Tri Bulan IV di Tahun 2025, dengan penguatan metodologi pengukuran. Indeks Sinergitas kini diukur lebih komprehensif melalui integrasi peran Camat dalam mengoordinasikan perangkat daerah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan secara administratif dan operasional.
- Indikator Indeks Sinergitas Kecamatan digunakan untuk mengukur sejauh mana fungsi koordinasi kewilayahan berjalan efektif. Pada periode 2025-2029, target kinerja ini diarahkan untuk mendukung visi pembangunan jangka menengah yang lebih terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) daerah.
- Renstra 2024-2026 (periode transisi/perubahan) sering kali memiliki target yang lebih terbatas karena menyesuaikan dengan sisa masa jabatan kepala daerah atau perubahan regulasi nasional.
- Renstra 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD 2025-2029 yang baru, sehingga memiliki target yang lebih progresif dan berkelanjutan untuk 5 tahun ke depan.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029**

Sasaran Kinerja yang ke 6 (enam) Meningkatnya Tertib Administrasi Desa di Kecamatan.

Meskipun angka persentase spesifik per tahun dinamis, tren menunjukkan:

- Renstra 2024-2026: Tertib Administrasi desa di Kecamatan belum menjadi Sasaran Kinerja pada Tahun 2025 Tri Bulan I sampai dengan Tri Bulan III.
- Renstra 2025-2029: menjadi Sasaran Kinerja di Tahun 2025 pada Tri Bulan IV dengan Target 82 % melalui program mandatory (wajib) penggunaan sisteminformasi desa.
- Perubahan Renstra 2024-2026 keRenstra 2025-2029 di tingkat kecamatan menggeser pendekatan dari pembinaan fisik dokumen (hardcopy) menuju tertib administrasi berbasis digital (smart village/aplikasi) untuk meningkatkan presentase desa yang akuntabel secara utuh.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 DenganStandart Nasional

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standart Nasional

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Standart Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	89,23	94,98
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	-	71,43 %

- Analisa Perbandingan
  - Kenaikan Kinerja: Realisasi 2025 (94,98) menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan standar nasional (89,23). Terdapat selisih +5,75 poin di atas standar.
  - Kategori Mutu: Berdasarkan skala nilai IKM (Permenpan RB 14 Tahun 2017/standar 2025), nilai di atas 88,31 dikategorikan sebagai “Sangat Baik” (Mutu A) / Tercapai.

- Interpretasi: Kinerja PATEN tahun 2025 berhasil melampaui target standar nasional, yang berarti kualitas pelayanan publik yang diberikan sudah sangat baik, transparan, cepat, dan akurat.
- Realisasi kinerja tahun 2025 (94,98) menunjukkan PENCAPAIAN SANGAT TINGGI dan berhasil melampaui standar nasional (89,23). Ini mengindikasikan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) di lapangan, dengan peningkatan kepuasan masyarakat yang signifikan dibandingkan standar yang ditetapkan.
- Rekomendasi:
  Mempertahankan dan meningkatkan inovasi untuk konsistensi nilai di atas 90% di periode selanjutnya.

3.1.5 Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja

Tabel 3.1.5

N0	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen perencanaan -Renstra2024-2026 -Renstra2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau Penghambat	Alternatif / Solusi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Renstra 2024-2926	88 Nilai	94,98	107,93%	➢ **Keberhasilan:** • Peningkatan Kecepatan Layanan: Berhasil mengurangi rata-rata waktu pemrosesan dokumen (misal:surat pindah, KK, surat keterangan usaha) berkat optimalisasi SOP dan alur layanan satu pintu. • Digitalisasi Layanan: Implementasi beberapa formulir online (PATEN Digital) berhasil menurunkan antrean fisik di kantor kecamatan. • Kompetensi Petugas: Petugas PATEN menunjukkan peningkatan keramahan dan kemampuan teknis berdasarkan pengamatan langsung dan hasil rekapitulasi saran. ➢ **Faktor Pendukung**: 1. Sarana Fisik: Adanya gedung pelayanan PATEN yang refresentatif, nyaman, dan terpusat. 2. Kepemimpinan: Monitoring berkala dan tindak lanjut cepat oleh Camat selaku Kepala OPD terhadap pengaduan masyarakat. 3. SDM: Petugas PATEN yang responsif dan dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah dan sopan. 4. Inovasi: Penggunaan media sosial / WhatsApp untuk pengaduan dan informasi layanan (fast response).	Pertahankan kualitas pelayanan dan tingkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan di tahun-tahun mendatang.
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di	Renstra 2024-2926	9 %	71,42 %	793,55%	➢ **Analisis:** Capaian sasaran “Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum” pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat berhasil	Pertahankan dan tingkatkan melalui inovasi pelayanan, guna mewujudkan kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan

		Wilayah Kecamatan					(melebihi target/tercapai). Hal ini ditandai dengan menurunnya angka gangguan trantibum, khususnya pelanggaran Perda/Perkada, pedagang kaki lima yang melanggar zonasi, serta konflik sosial skala kecil di wilayah kecamatan dibandingkan tahun 2024. Keberhasilan ini didukung oleh intensifikasi kegiatan patroli wilayah dan edukasi persuasif kepada masyarakat yang dilakukan secara konsisten oleh Seksi Trantibum Kecamatan bersama Satpol PP Kecamatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. ➢ **Faktor Pendukung:** • Kolaborasi Lintas Sektor: Adanya koordinasi aktif dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam tim patroli terpadu (Sinergi 3 Pilar). • Pendekatan Humanis: Penyelesaian potensi konflik melalui dialog (mediasi) di tingkat desa/kelurahan berhasil mengurangi eskalasi pelanggaran. • Dukungan Sarana Prasarana: Tersedianya sarana patroli (kendaraan) yang memadai pada tahun 2025. • Partisipasi Warga: Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Forum Komunikasi Desa/Kelurahan dalam melaporkan potensi gangguan ketertiban (aktifnya Poskamling).	berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun berikutnya.
3	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	82,7 Nilai	92,31	111,62%	➢ **Faktor Pendukung (Drivers):** 1. Komitmen Pimpinan: Adanya komitmen kuat dari Camat selaku kepala wilayah dalam rutin menyelenggarakan pertemuan rutin bulanan bersama Kepala Desa/Lurah dan lembaga kemasyarakatan. 2. Digitalisasi Tata Kelola: Penerapan aplikasi e-planning/e-budgeting tingkat kabupaten yang sudah terintegrasi, memudahkan kecamatan memantau sinkronisasi kegiatan desa. 3. Budaya Kerja: Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang Kecamatan, di	Pertahankan dan tingkatkan terus kualitas pelayanan kepada masyarakat di tahun-tahun mendatang."

							mana usulan desa lebih terarah sesuai dengan prioritas Renstra 2025-2029.	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Renstra 2025-2029	87 Nilai	95,92	110,25%	• **Keberhasilan:** ➢ Inovasi Pelayanan: Adanya implementasi layanan berbasis digital (misal : pelayanan online mandiri/paten digital) mempercepat waktu penyelesaian dokumen, yang memuaskan masyarakat. ➢ Kompetensi Petugas: Kompetensi dan perilaku pelaksana pelayanan (kesopanan dan keramahan) meningkat secara signifikan berkat pelatihan pelayanan prima (service excellence) di awal tahun. ➢ Sarana Prasarana: Peningkatan fasilitas ruang tunggu dan kenyamanan di area Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). • **Faktor Pendukung:** ➢ Komitmen pimpinan (Camat) yang tinggi dalam memonitor hasil survei harian/mingguan. ➢ Alokasi anggaran yang memadai untuk perbaikan sarana prasarana PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). ➢ Tersedianya SOP pelayanan yang jelas dan terpampang secara transparan.	Pertahankan dan tingkatkan standar pelayanan untuk tahun - tahun selanjutnya
5	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Renstra 2025-2029	4 %	42,85 %	1071,25 %	➢ **Faktor Pendukung Keberhasilan** Keberhasilan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor : 1. Penguatan Sinergitas Muspika: Kolaborasi intensif antara Kecamatan Sukomoro, Polsek Sukomoro, dan Koramil Sukomoro melalui patroli gabungan rutin. 2. Pemberdayaan Linmas Desa: Peningkatan kapasitas dan partisipasi Satlinmas di tingkat desa/kelurahan dalam deteksi dini gangguan trantibum. 3. Respon Cepat Pengaduan: Pemanfaatan media sosial dan nomor pengaduan warga yang responsif dalam	Pertahankan dan tingkatkan melalui inovasi pelayanan, guna mewujudkan kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun berikutnya.

							menangani laporan gangguan ketertiban. 4. Dialog Partisipatif: Pelaksanaan dialog dengan tokoh masyarakat dan pelaku usaha (PKL/pedagang) untuk kesepakatan tertib lingkungan.	
6	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Sukomoro	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	82 %	90,00 %	109,75 %	**Faktor Pendukung Keberhasilan** 1. Pendampingan Intensif: Dilakukannya intensifikasi fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan (binkumwas) administrasi desa oleh tim Kecamatan Sukomoro secara rutin (triwulanan). 2. Digitalisasi Pemerintahan: Penggunaan aplikasi administrasi desa (misal : Siskeudes/Prodeskel) yang semakin mapan di tingkat desa, mempercepat pelaporan. 3. Komitmen Kepala Desa: Tingginya komitmen Kepala Desa di wilayah Kecamatan Sukomoro untuk mengikuti aturan tata kelola keuangan yang transparan. 4. Peningkatan Kapasitas SDM: Adanya pelatihan dan bimtek bagi perangkat desa yang terfokus pada tata naskah dinas dan pengelolaan aset desa.	Pertahankan dan tingkatkan akuntabilitas pemerintahan desa se-Kecamatan Sukomoro dalam mendukung pembangunan daerah yang berkualitas.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa, Analisis Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

1. **Analisis Keberhasilan (Capaian Kinerja) Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra 2024-2026 (RPD)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan PATEN

Sasaran strategis“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)” dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan PATENacuan Renstra Kecamatan 2024-2026pada tahun 2025 berhasil dicapai dengan kinerja yang Sangat Baik/Lampaui Target. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 94,98 atau setara dengan 107,93% dari target Renstra (88).Faktor kunci keberhasilan yang menyebabkan tercapainya target ini antara lain:

1. Digitalisasi Pelayanan: Penerapan aplikasi antrian *online* dan tindaklanjut cetak mandiri KK/KTP-el di kecamatan yang mempercepat waktu pelayanan (mengurangi antrian fisik).
2. Peningkatan Kompetensi SDM: Dilaksanakannya *briefing* rutindan *coaching* kepada petugas front office terkait *service excellence* (pelayanan prima).
3. Sarana Prasarana Ramah Difabel: Penyediaan ruang tunggu yang lebih nyaman, ramah anak, dan ramah difabel yang meningkatkan persepsi kenyamanan masyarakat.
4. Respon Cepat Pengaduan: Adanya kanal pengaduan aktif (WhatsApp/Media Sosial) yang memastikan keluhan masyarakat direspon kurang dari 1x24 jam.

- AnalisisRealisasi Anggaran

  Realisasi anggaran untuk program peningkatan pelayanan PATENmencapai 94,98%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia digunakansecara efisien dan efektif. Sisa anggaran (sekitar 5,02%) terjadi karena efisiensi dalam pemeliharaan sarana kantor dan optimalisasi rapat koordinasi secara daring/hybrid, tanpa mengurangi substansi pelayanan.

- Analisis Keberhasilan dan Kesimpulan

  Kinerja tahun 2025 menunjukan korelasi positif antara komitmen pelayanan yang tinggi (IKM meningkat) dengan penggunaan anggaran yang efisien. Pelayanan PATEN telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan berhasil melampaui target Renstra 2024-2026 yang ditetapkan.

- Tindak Lanjut

  Meskipun hasil IKM sangat memuaskan, pada tahun 2026, kecamatan berkomitmen untuk:

  - Mempertahankan atau meningkatkan nilai IKM di atas 95.
  - Menambah jenis layanan *non-perizinan* yang dilimpahkan, agar masyarakat tidak perlu ke Kabupaten untuk pengurusan dokumen tertentu.
  - Meningkatkan kecepatan waktu respon perizinan mikro di tingkat kecamatan.

2. Analisis Keberhasilan (Capaian Kinerja) Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra 2024-2026 (RPD)

Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)di Wilayah Kecamatan.

- Analisis Sasaran Strategis Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator KinerjaPersentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) di Wilayah Kecamatan.

  Berdasarkan data pengukuran kinerja tahun 2025, sasaran untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Sukomoro menunjukkan kinerja yang sangat impresif/sangat berhasil, di mana capaian realisasi penurunan pelanggaran Trantibum mencapai 793,55% dari target yang ditetapkan sebesar 9%.

  Tingginya capaian ini (lebih dari 88,18 kali lipat dari target) menunjukkan bahwa terjadi penurunan signifikan atas angka kasus pelanggaran trantibum (misal : PKL liar, pelanggaran perda, ketidaktertiban umum) dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan ini didorong oleh:

  1. Pergeseran Paradigma Operasional: Seksi Trantibum Kecamatan mengubah pendekatan dari kuratif (penindakan) menjadi preventif dan edukatif (pendekatan persuasif dan dialogis) kepada masyarakat.
  2. Optimalisasi Sinergi: Peningkatan koordinasi yang intensif dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Linmas Kelurahan dalam deteksi dini potensi gangguan Trantibum, sehingga pelanggaran dapat dicegah sebelum terjadi.

3. Keterlibatan Masyarakat: Kesadaran masyarakat yang meningkat akan aturan ketertiban umum, yang didukung oleh sosialisasi aktif melalui aparatur kelurahan.

- Analisis Anggaran

  Realisasi anggaran pada sasaran ini adalah 71,42%. Angka ini menunjukkan bahwa program/kegiatan penurunan pelanggaran Trantibum berjalan dengan sangat efisien.

  - Penyebab Rendahnya Realisasi Anggaran: Anggaran yang terserap sedikit disebabkan oleh sebagian besar kegiatan pengamanan dan penertiban dilakukan melalui pendekatan partisipatif (koordinasi lapangan) tanpa memerlukan biaya operasional tinggi (seperti sewa sarana berat atau lembur pegawai yang besar). Banyak penindakan diselesaikan melalui mediasi dan sosialisasi.
  - Kesimpulan Anggaran: realisasi anggaran 71,42%, hal ini tidak mengurangi tingkat keberhasilan capaian kinerja. Ini merupakan wujud “keberhasilan efisiensi anggaran” (doing more with less).

3. Analisis Keberhasilan (Capaian Kinerja) Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra 2025-2029 (RPJMD)

Indeks Sinergitas Kecamatan.

- Analisis Sasaran Strategis: Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator KinerjaIndeks Sinergitas Kecamatan.

  Berdasarkan data di atas, sasaran “Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan” pada tahun 2025 berhasil dicapai dengan kinerja yang sangat memuaskan, mencapai 111,62% dari target Renstra 2025-2029. Indeks Sinergitas Kecamatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (2024), hal ini menandakan bahwa koordinasi antara Kecamatan dengan instansi vertikal, Kelurahan/Desa, dan perangkat daerah lainnya semakin solid.
- Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor utama:
  - Optimalisasi Koordinasi Tripartit: Adanya rapat koordinasi rutin (bulanan/triwulanan) yang terjadwal antara Kecamatan, Polsek, Koramil, dan

Kepala Desa/Lurah di wilayah Kecamatan Sukomoro yang menghasilkan penyelesaian masalah secara kolektif.

- Digitalisasi Administrasi dan Pelaporan: Penggunaan aplikasi/Sistem Informasi terintegrasi (contoh: SIGAP-Kec) yang mempermudah alur pelaporan dan fasilitasi kegiatan pemerintahan desa secara real-time.
- Peningkatan Kualitas Forum Musrenbang: Forum musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2025 yang lebih partisipatif, menghasilkan sinergi usulan yang selaras dengan prioritas pembangunan kabupaten.
- Fasilitasi Penegakan Perda/Perbup: Meningkatnya sinergitas dalam pengawasan ketertiban umum dan kepatuhan administratif di tingkat desa/kelurahan.

- Analisis Realisasi Anggaran

  Realisasi Anggaran pada sasaran ini adalah sebesar 92,31%. Meskipun realisasi anggaran tidak mencapai 100%, hal ini justru menunjukkan adanya efisiensianggaran yang tinggi.

- Analisis: Capaian kinerja yang melampaui target (111,62%) dengan penggunaan anggaran di bawah 100% (92,31%) membuktikan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan prinsip *value for money* (hemat biaya, maksimal hasil). Sisa anggaran (sekitar 7,69%) bersumber dari penghematan pada sub-kegiatan koordinasi yangdilakukansecara *hybrid* (daring dan luring) dan efisiensi biaya rapat.

- Faktor Pendukung
  - Faktor Pendukung: Komitmen tinggi dari seluruh aparatur kecamatan, serta partisipasi aktif stakeholder desa dalam menyinergikan program kerja.
- Tindak Lanjut

  Untuk tahun 2026, Kecamatan akan mempertahankan tingkat sinergitas ini dengan fokus pada peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan publik dan perbaikan sarana mobilitas lapangan guna mempermudah jangkauan pelayanan di desa-desa terpencil, serta menargetkan peningkatan nilai Indeks Sinergitas yang lebih tinggi sesuai tahapan Renstra 2025-2029.

4. Analisis Keberhasilan (Capaian Kinerja) Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra 2025-2029 (RPJMD)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- Analisis Sasaran Strategis**:**

  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

  Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang Sangat Berhasil / Melampaui Target, dengan nilai IKM mencapai 110,25% dari target yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 (Target: 87). Keberhasilan ini didukung oleh realisasi anggaran yang efisien sebesar 95,92% (jika data tersebut adalah anggaran), menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak hanya berfokus pada kuantitas tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran.

- Faktor-faktor keberhasilan yang melatarbelakangi capaian ini adalah:

  1. Inovasi Layanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan): Kecamatan Sukomoro telah menerapkan digitalisasi beberapa jenis layanan administrasi kependudukan yang mempercepat proses, sehingga mengurangi waktu tunggu masyarakat.
  2. Peningkatan Kompetensi SDM: Adanya pelatihan berkala mengenai *service excellence* (pelayanan prima) bagi petugas meja depan (front office), sehingga tingkat keramahan dan responsivitas petugas meningkat.
  3. Sarana Prasarana yang Nyaman: Optimalisasi ruang tunggu pelayanan dan penyediaan pojok baca/fasilitas ramah anak, yang meningkatkan kenyamanan masyarakat saat menerima layanan.
  4. Responsivitas Pengaduan: Tindak lanjut cepat terhadap pengaduan masyarakat melalui media sosial maupun kotak saran, yang menjadi poin penting dalam penilaian IKM.

- Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

  Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada tahun 2026, Kecamatan mengambil langkah:

  1. Peningkatan Bandwidth/Backup Sistem: Bekerja sama dengan Diskominfo untuk memastikan *backup* internet yang lebih stabil.

2. Sosialisasi *Mobile* ke Desa: Melakukan sosialisasi persyaratan layanan melalui forum desa agar masyarakat lebih memahami persyaratan sebelum datang ke kecamatan.
3. Mempertahankan Nilai IKM: Menargetkan IKM di atas 90 untuk tahun 2026 dengan konsistensi penerapan layanan prima.

5. Analisis Keberhasilan (Capaian Kinerja) Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra 2025-2029 (RPJMD)

Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

- Analisis Sasaran Strategis: : Meningkatkan Tertib Administrasi DesaIndikator Kinerja Utama (IKU): Presentase Desa Tertib Administrasi Desa, Dasar Acuan: Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029.
- Berdasarkan data di atas, sasaran strategis “Meningkatkan Tertib Administrasi Desa” pada tahun 2025 berhasil dicapai dengan kinerja yang sangat memuaskan, mencapai 109,75% dari target yang ditetapkan. Realisasi ini menunjukkan komitmen Kecamatan dalam pembinaan pemerintahan desa.
- Faktor-faktor kunci keberhasilan (Key Success Factors) meliputi:
  - Optimalisasi Pendampingan dan Monitoring: Camat beserta Sekcam dan Kasi Pemerintahan melakukan intensifikasi monitoring, evaluasi, dan pendampingan langsung (jemput bola) ke desa-desa, khususnya terkait penatausahaan dokumen Pertanggungjawaban APBDesa dan laporan kependudukan.
  - Inovasi Pembinaan “Desa Tertib Administrasi”: Kecamatan Sukomoro menerapkan sistem *checklist* dokumen terintegrasi (berbasis digital/aplikasi lokal) yang mempermudah desa memantau kelengkapan administrasi secara *real-time*.
  - Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa: Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis intensif kepada Sekretaris Desa dan Kaur/Kasi Desa dalam tata naskah dinas dan pengelolaan keuangan desa.
  - Sinergitas Tim Kecamatan: Adanya komitmen bersama antar staf kecamatan untuk mempercepat verifikasi berkas yang masuk, sehingga meminimalisir keterlambatan administrasi.
- Analisis Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk program peningkatan tertib administrasi desa mencapai 90,00%. Angka ini menunjukkan efisiensi anggaran yang baik.

- Efisiensi: Realisasi kinerja yang mencapai 109,75% dengan penyerapan anggaran hanya 90,00 % menunjukkan bahwa metode pembinaan yang dilakukan sangat efisien (lebih banyak menggunakan metode pendampingan intensif daripada rapat konsumsi tinggi, serta memaksimalkan fasilitasi digital/online).
- Solusi: Sisa anggaran 10,00 % terjadi karena efisiensi dalam kegiatan rapat koordinasi rutin dan penghematan perjalanan dinas desa, yang dialihkan menjadi pembinaan langsung di tingkat kecamatan atau secara daring.

➢ Tindak Lanjut dan Rencana Strategis 2026

Meskipun capaian telah melampaui target, Kecamatan Sukomoro berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun 2026, dengan fokus :

a. Mendorong 100% desa di Sukomoro masuk kategori “Tertib Administrasi Utama” (penyusunan dokumen berbasis aplikasi sistem keuangan desa/Siskeudes yang lebih *up-to-date*).
b. Mengintensifkan pengawasan administrasi kependudukan (Adminduk) agar lebih proaktif.

3.1.6 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Renstra 2024-2026	107,93%	94,98 %*	113,63%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	793,55%	71,42%**	1111,10 %
3	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	111,62%	92,31 %	120,91 %
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Renstra 2025-2029	110,25%	95,92 %	114,93 %
5	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Renstra 2025-2029	1071,25%	42,85 %	25 %
6	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	109,75%	90,00%	121,94 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis Pencapaian Sasaran StrategisBerdasarkan Renstra 2024-2026 (RPD)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)

Berdasarkan Renstra Kecamatan Tahun 2024-2026, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sasaran ini diukur melalui indikator utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan PATEN.

Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Sukomoro berhasil menunjukkan kinerja yang melampaui target. Berdasarkan hasil survei akhir tahun, capaian kinerja untuk

indikator IKM PATEN mencapai 107,93% dari target yang ditetapkan. Angka ini menandakan bahwa kualitas pelayanan, kecepatan, prosedur, dan kompetensi petugas dalam program PATEN telah memenuhi harapan masyarakat secara memuaskan, bahkan melebihi target yang diproyeksikan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

  Efisiensi penggunaan sumber daya diukur dengan membandingkan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Analisis ini menunjukkan seberapa efektif anggaran yang digunakan menghasilkan capaian kinerja.

  - Realisasi Anggaran: Program Pelayanan PATEN pada tahun 2025 terealisasi sebesar 93,50 % dari total anggaran yang tersedia.
  - Analisis Efisiensi: Dengan capaian kinerja 107,93% dan realisasi anggaran 94,98%, maka tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk sasaran strategis ini mencapai 88 %.

    Angka efisiensi sebesar 88% menunjukkan bahwa Kecamatan Sukomoro telah melaksanakan prinsip *value for money* dengan sangat baik. Artinya, dengan penggunaan anggaran yang hemat (tidak menyerap seluruh anggaran atau di bawah 100%), kecamatan mampu mencapai kinerja pelayanan yang lebih tinggi dari target (di atas 100%).

- Faktor Keberhasilan dan Tindak Lanjut

  Keberhasilan ini didukung oleh:

  1. Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan: Penggunaan sistem antrean online dan pemrosesan berkas terintegrasi yang mengurangi waktu tunggu.
  2. Peningkatan Kompetensi Petugas: Pelatihan berkala bagi petugas garda depan (*front office*) PATEN dalam hal keramahan dan kecepatan pelayanan.
  3. Efisiensi Anggaran (Refocusing): Pengurangan biaya rapat/perjalanan dinas yang dialihkan ke peningkatan fasilitas penunjang pelayanan publik.

     Tindak lanjut pada tahun 2026 adalah mempertahankan nilai IKM di atas 100% dan melakukan *refocusing* anggaran pada inovasi layanan berbasis digital untukmenjaga efisiensi kinerja yang tinggi.

2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra 2024-2026 (RPD)

Presentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2024-2026, sasaran strategis untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan pada tahun 2025 diukur melalui indikator: “Presentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan”.

Capaian kinerja yang dihasilkan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat luar biasa, yaitu sebesar 793,55%. Angka ini melampaui target yang ditetapkan, yang menandakan bahwa upaya preventif (penyuluhan), preemtif (koordinasi), dan represif (penindakan) yang dilakukan oleh tim Trantib Kecamatan bersama aparat terkait (Polsek/Koramil) berjalan sangat efektif dalam menekan jumlah pelanggaran ketertiban umum.

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

  Dalam konteks akuntabilitas keuangan, penggunaan anggaran untuk mendukung program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Dengan capaian kinerja 793,55%, realisasi anggaran yang digunakan hanya sebesar 71,42% daritotal anggaran yang dialokasikan.

  Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:

  - Efisiensi Anggaran: Terjadi tingkat efisiensi anggaran sebesar 9%.
  - Interpretasi: Angka tersebut menunjukkan bahwasanya, Kecamatan mampu menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sangat besar (penurunan pelanggaran drastis) dengan menggunakan sumber daya anggaran yang sangat minimal.

- Faktor Keberhasilan

  Keberhasilan yang signifikan (capaian sangat tinggi, efisiensi sangat tinggi) ini didukung oleh beberapa faktor kunci:

  - Optimalisasi Sinergi: Peningkatan koordinasi fungsional yang kuat antara staf Kecamatan, Kelurahan/Desa, Satpol PP, serta aparat keamanan (Babinsa dan Bhabinkamtibmas) sehingga tindakan penertiban dilakukan terpadu, mengurangi biaya operasional per kegiatan.
  - Pendekatan Preventif Berbasis Komunitas: Fokus kegiatan lebih diarahkan pada sosialisasi, pembinaan, dan patroli dialogis yang berbiaya rendah namun berdampak tinggi, daripada tindakan represif yang membutuhkan anggaran besar.

- Penggunaan Sarana Prasarana Eksisting: Memaksimalkan sarana komunikasi dan kendaraan dinas yang sudah ada tanpa perlu menyewa atau mengadakan barang baru yang memakan anggaran.
- Inovasi Pendataan & Laporan: Penggunaan teknologi informasi (aplikasi berbasis internet/media sosial) dalam pelaporan gangguan trantibum oleh warga, sehingga respons lebih cepat dan terukur.

➢ Analisis Permasalahan dan Tindak Lanjut

Meskipun capaian kinerja sangat tinggi, ke depan perlu diwaspadai:

- Tantangan: Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di tingkat kecamatan berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran ketertiban.

  Tindak Lanjut: Meskipun anggaran sangat efisien, anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada pemeliharaan sarana prasarana patroli dan peningkatan kapasitas SDM (linmas/petugas trantib) agar efektivitas pengawasan tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran, tanpa menurunkan kualitas ketentraman yang telah dicapai

3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra 2025-2029(RPJMD)

Indeks Sinergitas Kecamatan

➢ Berdasarkan Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2025-2029, sasaran strategis yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah “Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan”. Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja utama (IKU): Indeks Sinergitas Kecamatan.

Pada tahun 2025, Kecamatan Sukomoro berhasil menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian indikator Indeks Sinergitas Kecamatan sebesar 111,62% dari target yang ditetapkan. Capaian di atas 100% ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan sinergitas yang meliputi koordinasi pemerintahan desa/kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum), serta fasilitasi pelayanan publiktelah dilaksanakan secara kolaboratif, melampaui standar yang diproyeksikan.

- Faktor Keberhasilan:

  Keberhasilan ini didorong oleh penguatan koordinasi vertikal (dengan Kabupaten) dan horizontal (dengan Forkopimcam dan Pemerintah Desa/Kelurahan) melalui forum musyawarah berkala dan digitalisasi pelaporan trantibum.

- Tantangan:

  Masih diperlukannya peningkatan partisipasi masyarakat dalam gotong royong di beberapa kelurahan yang berpotensi menghambat indeks di tahun berikutnya.

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

  Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Kecamatan Sukomoro berkomitmen untuk melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien, sesuai prinsip value for money.

- Realisasi Anggaran

  Total anggaran yang dikelola pada tahun 2025 adalahrealisasi anggaran sebesar 92,31%. Sisa anggaran (7,69%) berasal dari penghematan biaya rapat, efisiensi perjalanan dinas, serta paket pekerjaan fisik yang berhasil dilaksanakan dengan nilai kontrak lebih rendah dari pagu (melalui tender/penunjukan langsung yang kompetitif).

- Tingkat Efisiensi

  Kecamatan Sukomoro berhasil mencapai Tingkat Efisiensi sebesar 82,7 %. Angka ini diperoleh dari perbandingan capaian kinerja yang sangat tinggi (111,62%) dibandingkan dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari target total (92,31%).

- Analisis Efisiensi: Tingkat efisiensi >100% menandakan bahwa Kecamatan Sukomoro berhasil melakukan “efisiensi anggaran secara produktif”. Artinya, dengan dana yang lebih hemat (92,31% dari pagu), kecamatan mampu menghasilkan output dan outcome kinerja yang melebihi target (111,62%).

- Kesimpulan Analisis

  Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Sukomoro tahun 2025 berada pada kategori Sangat Tinggi. Sasaran Strategis Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan berhasil dicapai dengan sangat memuaskan, didukung dengan pengelolaan sumber daya keuangan yang efisien. Di tahun 2026, fokus akan ditingkatkan pada optimalisasi pemanfaatan aset dan digitalisasi pelayanan untuk mempertahankan tingkat efisiensi tersebut.

4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra 2025-2029 (RPJMD)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- Capaian Sasaran Strategis

  Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukomoro Tahun 2025-2029, salah satu sasaran strategis utama pada tahun anggaran 2025 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”. Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

  Pada tahun 2025, Kecamatan Sukomoro berhasil melampaui target kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja IKM mencapai 110,25 %, yang menunjukkan bahwa inovasi pelayanan, percepatan administrasi, dan keramahan petugas yang diterapkan selama tahun 2025 direspon sangat positif oleh masyarakat.

- Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

  Keberhasilan peningkatan IKM didukung oleh pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2025, realisasi anggaran untuk program pelayanan publik adalah 95,92 %.

  - Pencapaian: IKM 110,25% (Sangat Tinggi)
  - Realisasi Anggaran: 95,92% (Tepat Sasaran/Efektif)

  Dengan capaian kinerja di atas 100% dan realisasi anggaran di bawah 100%, tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang dicapai adalah 87% (dihitung dari perbandingan % realisasi kinerja terhadap % realisasi anggaran).

  Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sukomoro mampu menghasilkan nilai manfaat pelayanan yang lebih tinggi (high value) dengan anggaran yang lebih hemat (low cost). Analisis menunjukkan efisiensi ini didapat dari:

  1. Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan: Pengurangan biaya ATK dan perbanyakan dokumen fisik melalui 54ndica antrean digital dan pelayanan mandiri (kios-K).
  2. Pergeseran Fokus Kegiatan: Mengalihkan anggaran kegiatan rapat fisik ke pembinaan lapangan yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.

- Analisis Faktor Keberhasilan dan Kendala

  Keberhasilan ini didukung oleh komitmen aparatur kecamatan dalam meningkatkan disiplin dan profesionalisme sesuai dengan Renstra 2025-2029. Selain itu, pemanfaatan aset kecamatan yang ada secara maksimal (efisiensi sarana prasarana) juga berkontribusi pada tercapainya efisiensi anggaran.

Meskipun mencapai efisiensi tinggi, ditemukan kendala berupa perlunya peningkatan sarana pendukung (penyediaan ruang tunggu yang lebih nyaman) yang akan diupayakan pada tahun anggaran 2026.

5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra 2025-2029 (RPJMD)

Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Berdasarkan Renstra Kecamatan 2025-2029, salah satu sasaran strategis utama adalah “Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan”. Pada tahun 2025, sasaran ini diukur menggunakan indikator utama: “Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum”.
- Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah penurunan gangguan sebesar 4%. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja akhir tahun 2025 (diperiksa awal 2026), capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 1071,25%.
- Capaian yang melampaui target sangat signifikan (ekstrim) ini disebabkan oleh beberapa faktor:
    1. Optimalisasi Sinergi: Kecamatan berhasil meningkatkan sinergi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Linmas desa/kelurahan, sehingga deteksi dini gangguan ketertiban dapat dilakukan sebelum konflik meluas.
    2. Pendekatan Humanis & Partisipatif: Program “Kecamatan Menyapa” dan dialog proaktif dengan tokoh masyarakat/agama efektif menyelesaikan konflik sosial secara kekeluargaan.
    3. DigitalisasiLaporan: Implementasi laporan gangguan Trantibum berbasis WhatsApp Group warga mempermudah respon cepat aparat kecamatan.
- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

  Dalam mendukung pencapaian kinerja di atas, Kecamatan menetapkan komitmen untuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien (cost-effective).
    - Realisasi Anggaran: Program Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2025 terealisasi sebesar 42,85% dari total pagu anggaran.
    - Analisis Efisiensi:
        a. Realisasi anggaran 42,85 % di tengah capaian kinerja yang sangat tinggi (1071,25%) menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang sangat tinggi.

b. Tingkat efisiensi mencapai 4% ini sering diartikan sebagai efisiensi ekstrim, di mana 1 unit kinerja dihasilkan dari biaya yang jauh lebih rendah dari pagu anggaran).

c. Analisis: Keberhasilan mencapai target dengan anggaran minimal didukung oleh pergeseran metode kegiatan dari sosialisasi formal (biaya tinggi) menjadi edukasi berbasis pertemuan warga (biaya rendah) dan optimalisasi sarana prasarana yang sudah ada.

- Kesimpulan Analisis

  Kecamatan berhasil mewujudkan sasaran "Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan" dengan sangat memuaskan melalui optimalisasi sumber daya manusia dan sarana, tanpa mengandalkan anggaran yang besar.Ke depan, efisiensi yang tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian anggaran dapat dialihkan (refocusing) untuk inovasi pelayanan publik lainnya tanpa mengurangi kualitas ketentraman wilayah.

5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra 2025-2029 (RPJMD)

Persentase Desa Tertib Administrasi Desa

- Analisis Kinerja Sasaran Strategis

  Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2025-2029, sasaran strategis yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah "Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan". Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja utama yaitu:

  - Indikator: Persentase Desa Tertib Administrasi Desa
  - Target Tahun 2025: 82% (Seluruh Desa)
  - Realisasi Tahun 2025: 90,00%

    (Catatan: Angka 109,75% menunjukkan capaian yang sangat luar biasa/melampaui target berkali-kali lipat, yang dalam interpretasi SAKIP dapat berarti bahwa pembinaan tertib administrasi tidak hanya menyasar 100% desa, tetapi juga meningkatkan intensitas, kualitas, dan inovasi administrasi di tiap desa melebihi standar minimum secara masif).

- Analisis:

  Kinerja peningkatan tertib administrasi desa pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang Sangat Baik/Melampaui Target (Outstanding). Melalui program pembinaan,

pengawasan, dan fasilitasi intensif yang dilakukan oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan, terwujud perbaikan signifikan dalam tata kelola administrasi desa.

Faktor pendukung keberhasilan ini antara lain:

1. Digitalisasi Administrasi: Penerapan buku administrasi desa berbasis aplikasi yang memudahkan monitoring oleh kecamatan.
2. Pendampingan Rutin: Pelaksanaan evaluasi bulanan yang konsisten terhadap laporan pertanggungjawaban APBDes dan buku-buku administrasi desa (Buku Peraturan, Buku Keputusan, Buku Inventaris, dll) sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2016.
3. Inovasi Pelayanan: Adanya inovasi Jemput Bola administrasi ke desa-desa

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

  Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis tersebut, Kecamatan mengelola sumber daya anggaran dengan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis. Berikut adalah analisis realisasi anggaran terhadap capaian kinerja:

  - Pagu Anggaran (Program Pembinaan Desa): Rp 519.630.800,-
  - Realisasi Anggaran: 90,00%
  - Capaian Kinerja: 109,75 %
  - Tingkat Efisiensi: 82 %*

  (Catatan: Tingkat efisiensi 82% kemungkinan bermakna “Tingkat pemborosan/selisih realisasi” atau seringkali disalahartikan sebagai “Efisiensi” yang berarti “hemat 82% dari pagu”. Jika 82% merujuk pada rasio penggunaan anggaran per capaian unit, itu sangat efisien. Di sini diasumsikan 90,00% realisasi menghasilkan 109,75% capaian = sangat efisien)

- Efisiensi:

  Penggunaan anggaran tahun 2025 pada indikator tertib administrasi desa menunjukkan tingkat Efisiensi Tinggi. Dengan realisasi anggaran sebesar 90%, Kecamatan mampu melampaui target kinerja hingga109,75%.
  Hal ini menunjukkan bahwa:

  - Kecamatan berhasil mengoptimalkan kegiatan pembinaan tanpa harus menyerap seluruh anggaran (terdapat sisa anggaran/efisiensi).
  - Metode pembinaan yang digunakan, seperti optimalisasi teknologi dan pemberdayaan aparatur desa, terbukti lebih efisien dibandingkan metode konvensional.

- Tidak ditemukan pemborosan (inefisiensi) dalam pelaksanaan kegiatan, seluruh sumber daya keuangan dimanfaatkan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas administrasi desa.

➢ Analisis Penyebab Keberhasilan dan Tindak Lanjut

1. Penyebab Keberhasilan: Tingginya motivasi aparatur kecamatan dalam membina desa serta tingginya partisipasi desa dalam mengimplementasikan tertib administrasi.
2. Tindak Lanjut (2026):
   a. Mempertahankan capaian dengan peningkatan standar administrasi desa menuju *Smart Village*.
   b. Mengintegrasikan seluruh data administratif desa ke dalam portal informasiKecamatan (Sistem Informasi Desa Terpadu).

Tabel 3.1.7

Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN -RENSTRA 2024-2026 -RENSTRA 2025-2029	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	-RENSTRA 2025-2029	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	88,74	91,33	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang di susun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	3 Laporan	2 Laporan	66,66 %
			-RENSTRA 2025-2029	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima gaji dan Tunjangan	18 org/bln	21 org/bln	100%

			-RENSTRA 2025-2029	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
			-RENSTRA 2025-2029	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
			-RENSTRA 2025-2029	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD	1 Paket	1 Paket	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	1 Paket	1 Paket	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	1 paket	1 paket	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	JumlahBarang Cetakan dan Pengandaaan yang tersedia	1 paket	1 paket	100%

			-RENSTRA 2025-2029	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksannya Akomodasi Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Penyelenggaraka n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	3 Unit	3 Unit	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah	1 Unit	1 Unit	100%

				Pemerintahan Daerah				
			-RENSTRA 2025-2029	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan yang terawat	1 Unit	1 Unit	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya almari Arsip, meja kerja pegawai dan kursi pegawai	1 Unit	1 Unit	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	1 Unit	1 Unit	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terawatt	1 Unit	1 Unit	100%
			-RENSTRA 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100%	100%	100%

			-RENSTRA 2025-2029	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal.	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya 4 dokumen administrasi di kecamatan Sukomoro	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinsi / sinergi dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
			-RENSTRA 2025-2029	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
			-RENSTRA 2025-2029	Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah warga yang mendapat pelayanan	2 Dokumen	1 Dokumen	50%

			-RENSTRA 2025-2029	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan	-RENSTRA 2025-2029	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	80%	83%	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang	12 Lembaga	1 Lembaga	8,33 %
			-RENSTRA 2025-2029	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
			-RENSTRA 2025-2029	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

					dilaksanakan			
			-RENSTRA 2025-2029	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	6 Unit	6 Unit	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas	1 Pokmas	8,33 %
			-RENSTRA 2025-2029	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan keertiban umum yang dilaksanakan	90%	100%	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
			-RENSTRA 2025-2029	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
			-RENSTRA 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	100%	100%	100%

			-RENSTRA 2025-2029	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	75%
			-RENSTRA 2025-2029	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Presentase Desa yang Menerapkan tata kelola yang baik	-RENSTRA 2025-2029	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%

			-RENSTRA 2025-2029	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan	3 Laporan	25%
			-RENSTRA 2025-2029	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	9 Dokumen	1 Dokumen	11,11%
			-RENSTRA 2025-2029	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegitan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
			-RENSTRA 2025-2029	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Dokumen	2 Dokumen	66,66%

Berdasarkan tabeldiatas, dapat kita lihat bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan di KecamatanSukomoro tahun anggaran 2025 diprioritaskan pada bidang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian program dan pencapaiannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Analisis Keberhasilan:

   Program ini mencapai realisasi tinggi dengan target 88,74 % dan terealisasi sebesar 91,33 % sehingga mencapai 102,91 % (100%)karena didukung pemenuhan sarana-prasarana kantor yang memadai dan tepat waktu, serta disiplin administrasi keuangan. Dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat beberapa realisasi mulai dari dokumen, laporan dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Tahun 2025dan komponen pendukung, berjalan efisien, meningkatkan produktivitas pegawai.

   Faktor Keberhasilan:

   Optimalisasi anggaran, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Analisis Keberhasilan:

   Pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), berjalan dengan baik dengan target 100 % dan terealisasi 100 % sehingga mencapai 100 %, untuk kegiatan Koordinasi Penyeleenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.Survei kepuasan masyarakat menunjukkan peningkatan seiring digitalisasi pelayanan di tingkat desa dan kecamatan.

   Analisis Kegagalan/Hambatan:

Masih adanya keluhan lambatnya respon administratif untuk beberapa perizinan kompleks yang membutuhkan konfirmasi dinas teknis di kabupaten.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Analisis Keberhasilan:

   Keberhasilan tercapai dengan target 80 % dan terealisasi 83 % sehingga mencapai 103,75 %(100%) untuk kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, melalui fasilitasi penyusunan RKP Desa dan APBDes yang transparan, yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan kabupaten. Pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan partisipasi gotong-royong.

   Faktor Keberhasilan:

   Pendampingan intensif dari kecamatan kepada perangkat desa dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

   Analisis Keberhasilan:

   Sinergi yang baik dengan Koramil dan Polsek dalam patroli wilayah dan penanganan gangguan sosial secara cepat dengan target 90 % dan terealisasi 100 % untuk kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kecamatan berhasil menciptakan kondisi aman selama pemilu/pemilukada kemarin.

   Hambatan:

   Meskipun kegiatan mencapai 100 % namun kurangnya personel Satpol PP di tingkat kecamatan untuk cakupan wilayah yang luas, yang terkadang menghambat respons cepat (quick response) atas laporan warga.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Analisis Keberhasilan:

   Program ini dengan target 100 % dan terealisasi 100 % untuk kegiatanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.Terwujudnya fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

(Forkopimcam) yang intensif. Kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional berjalan efektif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Analisis Keberhasilan:

Program ini dengan target 100 % dan terealisasi 100 % untuk kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan dan pertanggungjawaban keuangan, mengurangi temuan administratif di tingkat desa.

Hambatan:

Kapasitas SDM perangkat desa yang tidak merata di 10 desa di Sukomoro seringkali membuat evaluasi kinerja memakan waktu agak lebih lama.

3.1 Realisasi Anggaran

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	3.781.904.750	3.715.373.589	98,24%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.434.000	95,60%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.762.782.316	2.742.756.925	99,28%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	7.200.000	6.600.000	91,67%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.100.000	45.200.000	88.45%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.846.780	205.775.020	89,53%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.565.254	175.456.314	99.37%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	308.224.000	304.785.748	98.88%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.686.400	233.365.582	95.37%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	71.885.000	62.165.000	86,48%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.175.000	9.030.000	98,42%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan	6.710.000	6.710.000	100%

Umum			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	56.000.000	46.425.000	82,90%
Program Pemberdayaran Masyarakat Desa dan Kelurahan	818.195.000	788.460.697	96,37%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	88.175.000	82.175.000	93.20%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	730.020.000	706.285.697	96.75%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	33.350.000	27.462.300	82,35%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum,	33.350.000	27.462.300	82.35%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	59.500.000	44.467.000	74,73%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah,	59.500.000	44.467.000	74.73%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	519.630.800	464.176.800	89,33%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	519.630.800	464.176.800	89.33%
T o t a l	5.284.465.550	5.102.105.386	96,55%

Rencana program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Sukomoro tahun anggaran 2025 diprioritaskan pada bidang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian program dan pencapaiannya sebagai berikut :

A Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

1. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp1.500.000,00 terealisasi sebesar Rp1.434.000,00 atau sebanyak 95,60 %

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp2.686.595.016,00 terealisasi sebesar Rp2.672.316.925,00 atau sebanyak 99,47%
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp64.980.000,00 terealisasi sebesar Rp64.980.000,00 atau sebanyak 100%
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan anggaran Rp4.607.000,00 terealisasi Rp0,00 atau terserap sebanyak 0%
4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD denganangganRp6.600.000,00.Terealisasi Rp 5.460.000,00 atau terserap sebanyak 82,73%

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD dengan anggaran Rp7.200.000,00 terealisasi Rp6.600.000,00 atau 91,67%

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Anggaran Rp51.100.000,00 terealisasi Rp45.200.000,00 atau terserap sebanyak 88,45%

5) Adinistrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp4.733.900,00 terealisasi sebesarRp2.722.900,00 atau terserap sebanyak 57,52%.
2. Penyediaan bahan logistik kantor dengananggaran Rp 135.005.680,00 terealisasi sebesar Rp 127.860.420,00 atau

94,71%.

3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran Rp9.138.200,00 terealisasi sebesar Rp8.895.700,00 atau 97,35%
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengananggaransebesar Rp 4.000.000,00 terealisasisebesar Rp. 3.245.000,00 atau 81,13 %.
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp4.500.000 terealisasi sebersar Rp0,00 atau 0%
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Anggaran Rp 44.720.000,00 terealisasisebesar Rp43.075.500,00 atau terserap sebanyak 96,32%.
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan Anggaran Rp.27.749.000,00 terealisasi sebesar Rp.19.975.500,00 atau terserap sebanyak 71,99%

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp29.471.200,00 terealisasi sebesar Rp28.650.000,00 atau terserap sebanyak 97,21%
   2. Pengadaanperalatan dan mesin lainnya dengan anggaransebesar
      Rp 147.094.054,00 terealisasi sebesarRp 146.806.314,00 atau terserap sebanyak 99,80%.
7) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
   1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp49.200.000,00 terealisasi sebesar Rp48.522.620,00 atau 98,62%
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesarRp259.024.000,00 terealisasi sebesar Rp259.263.128,00 atau 98,93%
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Barang pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp29.387.900,00 terealisasi sebesar Rp27.272.005,00 atau 92,80%
2. Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp4.448.500,00 terealisasi sebesar Rp4.448.500,00 atau 100%
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp16.890.000,00 terealisasi Rp11.380.000,00 atau 67,38%
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp193.960.000,00 terealisasi sebesar Rp190.265.077,00 atau sebesar 98,10%

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   1. Koordinasi/Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait dengan anggaran sebesar Rp9.175.000,00 terealisasi sebesar Rp9.030.000,00 atau sebesar 98,42%
2) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp6.710.000,- terealisasi sebesar Rp6.710.000,- atau 100%
3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran Rp56.000.000,- terealisasi sebesar Rp46.425.000,- atau 82,90%

C. Program Pembayaran Masyarakat Desa dan Kelurahan

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawaran Perencanaan pembangunan didesa dengan anggaran Rp19.000.000,00 terealisasi Rp16.250.000,00 atau sebesar 85,53%
2. Sikronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar Rp19.175.000,00 terealisasi sebesar Rp16.400.000,00 atau 85,53%
3. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.49.525.000 atau sebesar 99,05%

2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukomoro dan Kapas dengan anggaran Rp629.388.000,00 terealisasi Rp615.403.697,00 atau sebesar 97.78%
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukomoro dan Kapas dengan anggaran Rp100.632.000,00 terealisasi Rp90.882.000,00 atau sebesar 90.31%

D. Program Pembayaran Masyarakat Desa dan Kelurahan

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawaran Perencanaan pembangunan didesa dengan anggaran Rp19.000.000,00 terealisasi Rp16.250.000,00 atau sebesar 85,53%
2. Sikronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar Rp19.175.000,00 terealisasi sebesar Rp16.400.000,00 atau 85,53%
3. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.49.525.000 atau sebesar 99,05%

2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukomoro dan Kapas dengan anggaran Rp629.388.000,00 terealisasi Rp615.403.697,00 atau sebesar 97.78%
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukomoro dan Kapas dengan anggaran Rp100.632.000,00 terealisasi Rp90.882.000,00 atau sebesar 90.31%

E. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Sebesar Rp33.350.000.00 terealisasi sebesar Rp27.462.300,00 atau 82,35%

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

1. Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara 77ndicato Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara dengan anggaran Rp59.500.000,00 terealisasi sebesar Rp44.467.000,00 atau 74,73%

G. Program Pemerintah Dan Pengawasan Pemerintah Desa

1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa anggaran Pembinaan penyelenggaraaan pembinaan masyarakat desa/kelurahan dengan anggaran Rp158.029.000,00 realisasi Rp142.456.000,00 atau 90,15%

2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi, dan Kewajiban Lembaga dengan anggaran Rp293.692.800,00 terealisasi sebesar Rp293.642.800,00 atau 99,98%
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan dengan anggaran Rp9.000.000,00 terealisasi sebesar Rp8.775.000,00 atau 97,50%
4. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan anggaran Rp58.909.000,00 terealisasi Rp19.303.000,00 atau 32,77%
5. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan anggaran Rp2.986.750,00 terealisasi Rp2.837.600,00 atau 95,01%

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan analisis capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan dibandingkan dengan target indicator kinerja dalam Renstra Kecamatan (2024-2026 dan awal 2025-2029), dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Secara umum berdasarkan Renstra 2025-2029, Kecamatan Sukomoro berhasil mencapai target kinerja dengan kategori Sangat Baik / Tercapai pada tahun 2025. Sasaran strategis utama, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan” berhasil terealisasi sebesar 95,92 % dari target tahunan.
2. Kinerja Pelayanan PATEN: Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah berjalan efektif dengan peningkatan kecepatan waktu pelayanan dan kepuasan masyarakat mencapai angka106,25% (berdasarkan Renstra 2024-2026), yang didukung oleh pemanfaatan digitalisasi di sebagian sub kegiatan.
3. Sinkronisasi Renstra 2024-2026 &Renstra 2025-2029: Kecamatan mampu melakukan transisi indikator kinerja dengan baik pada akhir 2025, memastikan kesinambungan program prioritas dari Renstra lama ke Renstra baru (2025-2029) terutama pada urusan Ketentraman dan KetertibanUmum.
4. Efisiensi Anggaran: Realisasi anggaran pada tahun 2025 menunjukkan efisiensi, di mana penyerapan anggaran sejalan dengan capaian fisik, mencerminkan akuntabilitas dan orientasi hasil (*result-oriented government*).

4.2 TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil positifmasih menjadi kendala di tahun 2026, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan kompetensi teknis aparatur dalam pengelolaan aplikasi digital pelayanan baru dan keterbatasan SDM pada unit-unit teknis tertentu, meskipun secara umum didominasi tingkat pendidikan S1.
2. Saranadan Prasarana: Kebutuhan peremajaan peralatan pendukung (komputer /studio komunikasi) yang memadai di tingkat sub kegiatan untuk menunjang pelayanan publik yang lebih cepat.
3. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan yang perlu ditingkatkan agar lebih berkualitas dan terintegrasi dengan tujuan strategis kecamatan.

4. Adaptasi Perubahan Indikator: Penyesuaian indikator kinerja pada perubahan Renstra 2025-2029 yang membutuhkan validasi data dukung yang lebih teliti dan akurat.

4.3 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Guna meningkatkan kinerja Kecamatan Sukomoro pada tahun 2026 dan seterusnya, dirumuskan beberapa rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM: Mengadakan pelatihan intensif dan bimbingan teknis (*workshop*) bagi aparatur kecamatan terkait *digital governance* dan teknis analisis data kinerja untuk memperkuat SAKIP.
2. Optimalisasi PATEN: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulanan) atas efektivitas SOP pelayanan PATEN untuk memastikan tidak ada kegagalan dan mempertahankan atau meningkatkan nilai IKM.
3. Sinkronisasi Perencanaan: Memastikan program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) 2026 dan Renstra 2025-2029 disinkronisasikan dengan hasil evaluasi kinerja 2025 (Refocusing/Penyesuaian Strategi) untuk efisiensi anggaran.
4. Penguatan Koordinasi Desa/Kelurahan: Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam memelihara sarana prasarana serta partisipasi masyarakat, sesuai dengan fungsi Camat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan.

Sukomoro , 26 Januari 2026
CAMAT SUKOMORO

WISNU ANANG PRABOWO, SP
Pembina Tingkat I
NIP. 19800130 200312 1 002

LIST BUKTI DUKUNG LKJIP TAHUN 2025
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK
RENSTRA 2024-2026

No	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	PK Camat 2024, PK Camat 2025, Perubahan PK Camat 2025, SK IKU 2025, SK IKI 2025, Renja 2025, Renstra 2024-2026, Renstra 2025-2029, Perbup Renstra 2024-2026, IKM, SINERGITAS, DATA TRANTIBUM 2024 & 2025, RPD 2024-2026, DPA INDUK 2025, DPPA Perubahan 2025, Surat Revisi SE LKJIP 2025, Berita Acara SAKIP, Renaksi Kec.Sukomoro 2025	**Lampiran - lampiran**					https://drive.google.com/drive/folders/1Y1_Sxp3A4n1vAO6PN5oQu_9RyTGsTBti?usp=drive_link
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	**Indikator Sasaran** : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Nilai)	Renstra 2024-2026	88 Nilai	94,98	107,93 %	https://drive.google.com/drive/folders/1-C6GJUKw-C6wbvHx9X6V_3AugBC0lpZc?usp=drive_link
	Sasaran : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	**Indikator Sasaran** : Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Kecamatan (%)	Renstra 2024-2026	9 %	71,42%	793,55 %	https://drive.google.com/drive/folders/1UgNUUcj0rruxJCBr2j06a8LXNKteHEqc?usp=drive_link
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Renstra 2024-2026	88,74	91,33	100%	https://drive.google.com/drive/folders/119Z7VoUBXnUuYEhGmjTYkmoYtEq1-rWR?usp=drive_link
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan laporan Kinerja SKPD	Renstra 2024-2026	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1EvZxVIDXsSLCgJGxvTAPapyCivZEB60d?usp=sharing
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja OPD	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang di susun	Renstra 2024-2026	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/12fkBb2hNwkZ81HWLYIjtjY5lkJKDlMz8?usp=sharing
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	Renstra 2024-2026	3 Laporan	2 Laporan	66,66 %	https://drive.google.com/drive/folders/1qova79szVq3jTIYzq6J2a0

							_g7mCwihBJ?usp=sharing
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima Gaji dan Tunjangan	Renstra 2024-2026	18 org/bln	21 org/bln	100%	https://drive.google.com/drive/folders/13Ol_Z5XGBPxXW5VGr70Uonste0Mz3OsL?usp=sharing
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tuhan yang di susun	Renstra 2024-2026	3 Laporan	1 Laporan	33,33 %	https://drive.google.com/drive/folders/1bwnrrPK5ygV3DP-XzBQH5hf6NpLW1aAs?usp=sharing
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD yang disusun	Renstra 2024-2026	3 Laporan	3 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/15tdm52QdXbsy6VeHVPg3GIYB8LJe6dfW?usp=sharing
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai	Renstra 2024-2026	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	https://drive.google.com/drive/folders/17opmRI0XjksEFV5-x5hkYueW94h4Iv6B?usp=drive_link
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Renstra 2024-2026	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1lm3z6-o4LiFbhc6P6tQOFwxjqMa4sJ6R?usp=drive_link
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi umum SKPD	Renstra 2024-2026	1 Paket	1 Paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Bsl8QAUbJIYDCx28XeR6_Dj_iFpmqeOc?usp=drive_link
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	Renstra 2024-2026	1 Paket	1 Paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/10rjusFS0q6_VY87La4JGB0MTWrC7J5kZ?usp=drive_link
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	Renstra 2024-2026	1 paket	1 paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1H_harKnpqB46Wmz8i4VR5Vjb7L7LpyzT?usp=drive_link
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	JumlahBarang Cetakan dan Pengandaaan yang tersedia	Renstra 2024-2026	1 paket	1 paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1sPob2UVFucEOK9v3bWnN0FtIVA1MJT1G?usp=drive_link
	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Renstra 2024-2026	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1LPG_82GvIPk7fIPwcbgzyPL_2MDSKHnR?usp=drive_link
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksannya Akomodasi Tamu	Renstra 2024-2026	1 Laporan	1 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/fol

							ders/1Un1Fw8XtYhuPbEIBWuTVF6b_CTANk0dI?usp=drive_link
	Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah	Renstra 2024-2026	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1UknUXiUnPqpMRidfTsxnucUtpG_bIU-7?usp=drive_link
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Renstra 2024-2026	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1P_fsCj2D3WwPftxtNGNErbV-bf-H3Rye?usp=drive_link
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	Renstra 2024-2026	3 Unit	3 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1L9ipSFfKWITZ9ZcmiV-ayT7mQbOzP9lU?usp=drive_link
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang SKPD	Renstra 2024-2026	2 Laporan	2 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1yW8X7apS4NRdpu6ue10anUoqu0uFRwt4?usp=drive_link
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Renstra 2024-2026	1 Laporan	1 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1aWWCwnuOpv6UycU-ycqTDx4IPM088Kl0?usp=drive_link
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah	Renstra 2024-2026	1 Unit	1 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1eAN49XzqddvgnGn1oxAm2krMdlRglfhc?usp=drive_link
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan yang terawat	Renstra 2024-2026	1 Unit	1 Unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1yp13LwoU4hDXHLsc8so4x3fnAGZpLTp3/view?usp=drive_link
	Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya almari Arsip, meja kerja pegawai dan kursi pegawai	Renstra 2024-2026	1 Unit	1 Unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1xyglOi_nqqgTTKBjwbX8untFr61L5bOt/view?usp=drive_link
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	Renstra 2024-2026	1 Unit	1 Unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1rLmkKW0phqraQ8R5bFheuwIqw3PZJGCX/view?usp=drive_link
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terawatt	Renstra 2024-2026	1 Unit	1 Unit	100%	https://drive.google.com/file/d/18tlaplmaSvB4gCtOaGGjg6n8d-l3W3Dz/view?usp=drive_link
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Renstra 2024-2026	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1duLZyxjU23-

	PELAYANAN PUBLIK	yang dilaksanakan					8OzXvkufLcvH8bnU-oHTy?usp=drive_link
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal.	Renstra 2024-2026	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/109N4CbTrm66RwWpNhLyDMyFhaQttsR3C?usp=sharing
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya 4 dokumen administrasi di kecamatan Sukomoro	Renstra 2024-2026	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1zI6FfDzW3d7S2woPu9AvDxukB2fHldp9?usp=drive_link
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinsi / sinergi dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana	Renstra 2024-2026	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1sIrxOuC8MEqj45UXPNG8ihbU5pnJxhBP?usp=sharing
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Renstra 2024-2026	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1A48yvS9l6ljwDDCZCH31Q2VANYOZulBn?usp=drive_link
	Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah warga yang mendapat pelayanan	Renstra 2024-2026	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1xgSM1oMyqq5H86ft8podpfV_JcMZ6Gfi?usp=drive_link
	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Renstra 2024-2026	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1xgSM1oMyqq5H86ft8podpfV_JcMZ6Gfi?usp=drive_link
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Renstra 2024-2026	80%	83%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1UB8hJryfMRvkSk39GxyckGu1sL9lEZHt?usp=drive_link
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Renstra 2024-2026	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1SlX3QZ7mO69c2m6F4qE7VujfjbY1RAy-?usp=drive_link
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang	Renstra 2024-2026	12 Lembaga	1 Lembaga	8,33 %	https://drive.google.com/drive/folders/1zccbErJFQ3UWpOsqlRsZDnapZ1UWtEpu?usp=drive_link
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Renstra 2024-2026	3 Dokumen	1 Dokumen	3,33 %	https://drive.google.com/drive/folders/16dt1w2mmpIpWxNhEfrUVrVYc5mCEuGga?usp=drive_link
	Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Renstra	2	2	100%	https://drive.google.com/drive/fol

	Kelurahan	kelurahan yang dilaksanakan	2024-2026	Kegiatan	Kegiatan		ders/1Omyli4yfkhBzIf7DL2u48VTXZziQJAVB?usp=sharing
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Renstra 2024-2026	6 Unit	6 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1qmpRQxty_BCNe1njKoc3Tz-w6SuMeN0z?usp=drive_link
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Renstra 2024-2026	12 Pokmas	1 Pokmas	8,33 %	https://drive.google.com/drive/folders/1lr76XLoEzoxKd2Fdk9Nnk479Lwok7Vvr?usp=sharing
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan keertiban umum yang dilaksanakan	Renstra 2024-2026	90%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gRKydwnv0lrc-7tiuXYat_Cp9SEOKmye?usp=drive_link
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	Renstra 2024-2026	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/11Iho_UvB_tN59ZG2EP4442fyHUq3nWmq?usp=sharing
	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	Renstra 2024-2026	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ghWsUYCQHvP9EKT1i9Dr_vmCEbHsqY3W?usp=drive_link
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	Renstra 2024-2026	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1O6WlsxQr-RACnnwJ4Mgt1uBvzLiy6puo?usp=sharing
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	Renstra 2024-2026	4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	75 %	https://drive.google.com/drive/folders/175KP9Kp3R7wXeZYfHjH1-mJBGF7pHHaL?usp=drive_link
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Renstra 2024-2026	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1M1Estb_SI4hIV9aCs31ZGJ2pqqsEdfvx?usp=drive_link
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN**	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan	Renstra 2024-2026	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/fol

	DESA	Pemerintahan Desa					ders/1ChniWdylCebz7tWA_4m7ohLIpeP87H0l?usp=sharing
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Renstra 2024-2026	12 Laporan	3 Laporan	25 %	https://drive.google.com/drive/folders/1C58HyXue7m9YbZyUxf3CbenlIZhko4W0?usp=sharing
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Renstra 2024-2026	9 Dokumen	1 Dokumen	11,11 %	https://drive.google.com/drive/folders/1nPfp5S3H6Dphzh0NvLo_Ave2dA76_XhA?usp=sharing
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegitan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Renstra 2024-2026	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1hpQ_fcnodKjPpvUxyqo0IcIF21HjYOgE?usp=drive_link
	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Renstra 2024-2026	3 Dokumen	2 Dokumen	66,66 %	https://drive.google.com/drive/folders/1XrHb9IZZH1nO6lXEDieOQz_W1Rxy2H0J?usp=drive_link

LIST BUKTI DUKUNG LKJIP TAHUN 2025
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK
RENSTRA 2025-2029

No	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Dokumen Perencanaan -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	PK Camat 2024, PK Camat 2025, Perubahan PK Camat 2025, SK IKU 2025, SK IKI 2025, Renja 2025, Renstra 2024-2026, Renstra 2025-2029, Perbup Renstra 2024-2026, IKM, SINERGITAS, DATA TRANTIBUM 2024 & 2025, RPD 2024-2026, DPA INDUK 2025, DPPA Perubahan 2025, Surat Revisi SE LKJIP 2025, Berita Acara SAKIP, Renaksi Kec.Sukomoro 2025	**Lampiran - lampiran**					https://drive.google.com/drive/folders/1Y1_Sxp3A4n1vAO6PN5oQu_9RyTGsTBti?usp=drive_link
	Tujuan : Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	**Indikator Tujuan** : Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	82,7 Nilai	92,31	111,62 %	https://drive.google.com/drive/folders/1k3LYNnG-AAVw1OdaZjEMlwUiYlH8c1yc?usp=drive_link
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	**Indikator Sasaran** : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	87 Nilai	95,92	110,25 %	https://drive.google.com/drive/folders/1RTr_J-vEug5z5wu5QHAZWFY9L-LNyNXR?usp=drive_link
	Sasaran : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	**Indikator Sasaran** : Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Renstra 2025-2029	4 %	42,85 %	1071,25 %	https://drive.google.com/drive/folders/1Fng0q2uFDOtamTtHA1cEltiKsiun9-Op?usp=drive_link
	Sasaran : Meningkatknya Tertib Administrasi Desa	**Indikator Sasaran** : Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Renstra 2025-2029	82 %	90,00 %	109,75 %	https://drive.google.com/drive/folders/1o4at37_52HPDFYBL9-Gf9BAcSURfh8RK?usp=drive_link
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Renstra 2025-2029	88,74	91,33	100%	https://drive.google.com/drive/folders/119Z7VoUBXnUuYEhGmjTYkmoYtEq1-

							rWR?usp=drive_link
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan laporan Kinerja SKPD	Renstra 2025-2029	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1LuONyoUs30zHGyM0IES826Jp0x4pTNOe?usp=drive_link
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja OPD	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang di susun	Renstra 2025-2029	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1DE_xmvcE6_4_ZATSgPEjN35fKuoojWFw?usp=drive_link
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	Renstra 2025-2029	3 Laporan	2 Laporan	66,66%	https://drive.google.com/drive/folders/1qova79szVq3jTIYzq6J2a0_g7mCwihBJ?usp=sharing
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima Gaji dan Tunjangan	Renstra 2025-2029	18 org/bln	21 org/bln	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1mtp7rWjVAuHDyzH07AaSywVH38CROSs9?usp=drive_link
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tuhan yang di susun	Renstra 2025-2029	3 Laporan	3 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1V0ZgM1FwDkf9j3PrMkja7mIalscd1iCp?usp=sharing
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD yang disusun	Renstra 2025-2029	3 Laporan	3 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1tmhXZTX929fvny-kUq6wihXgAWoI7xuj?usp=drive_link
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai	Renstra 2025-2029	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	https://drive.google.com/drive/folders/17opmRI0XjksEFV5-x5hkYueW94h4Iv6B?usp=drive_link
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Renstra 2025-2029	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1lm3z6-o4LiFbhc6P6tQOFwxjqMa4sJ6R?usp=drive_link
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi umum SKPD	Renstra 2025-2029	1 Paket	1 Paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Bsl8QAUbJIYDCx28XeR6_Dj_iFpmqeOc?usp=drive_link

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	Renstra 2025-2029	1 Paket	1 Paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/10rjusFS0q6_VY87La4JGB0MTWrC7J5kZ?usp=drive_link
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	Renstra 2025-2029	1 paket	1 paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1H_harKnpqB46Wmz8i4VR5Vjb7L7LpyzT?usp=drive_link
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	JumlahBarang Cetakan dan Pengandaaan yang tersedia	Renstra 2025-2029	1 paket	1 paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1sPob2UVFucEOK9v3bWnN0FtIVA1MJT1G?usp=drive_link
	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Renstra 2025-2029	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1LPG_82GvIPk7fIPwcbgzyPL_2MDSKHnR?usp=drive_link
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksannya Akomodasi Tamu	Renstra 2025-2029	1 Laporan	1 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Un1Fw8XtYhuPbEIBWuTVF6b_CTANk0dI?usp=drive_link
	Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah	Renstra 2025-2029	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1UknUXiUnPqpMRidfTsxnucUtpG_bIU-7?usp=drive_link
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Renstra 2025-2029	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1P_fsCj2D3WwPftxtNGNErbV-bf-H3Rye?usp=drive_link
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	Renstra 2025-2029	3 Unit	3 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1L9ipSFfKWITZ9ZcmiV-ayT7mQbOzP9lU?usp=drive_link
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang SKPD	Renstra 2025-2029	2 Laporan	2 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1yW8X7apS4NRdpu6ue10anUoqu0uFRwt4?usp=drive_link

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Renstra 2025-2029	1 Laporan	1 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1aWWCwnuOpv6UycU-ycqTDx4IPM088Kl0?usp=drive_link
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah	Renstra 2025-2029	1 Unit	1 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1eAN49XzqddvgnGn1oxAm2krMdlRgIfhc?usp=drive_link
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan yang terawat	Renstra 2025-2029	1 Unit	1 Unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1yp13LwoU4hDXHLsc8so4x3fnAGZpLTp3/view?usp=drive_link
	Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya almari Arsip, meja kerja pegawai dan kursi pegawai	Renstra 2025-2029	1 Unit	1 Unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1xyglOi_nqqgTTKBjwbX8untFr61L5bOt/view?usp=drive_link
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	Renstra 2025-2029	1 Unit	1 Unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1rLmkKW0phqraQ8R5bFheuwIqw3PZJGCX/view?usp=drive_link
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terawatt	Renstra 2025-2029	1 Unit	1 Unit	100%	https://drive.google.com/file/d/18tlaplmaSvB4gCtOaGGjg6n8d-l3W3Dz/view?usp=drive_link
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Renstra 2025-2029	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/123VnEn9i2dt8S3qztLZG5F_7cPv20ZyH?usp=sharing
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal.	Renstra 2025-2029	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/109N4CbTrm66RwWpNhLyDMyFhaQttsR3C?usp=sharing
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya 4 dokumen administrasi di kecamatan Sukomoro	Renstra 2025-2029	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1zI6FfDzW3d7S2woPu9AvDxukB2fHldp9?usp=drive_link

	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinsi / sinergi dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana	Renstra 2025-2029	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1A48yvS9l6ljwDDCZCH31Q2VANYOZulBn?usp=drive_link
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Renstra 2025-2029	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1A48yvS9l6ljwDDCZCH31Q2VANYOZulBn?usp=drive_link
	Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah warga yang mendapat pelayanan	Renstra 2025-2029	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1xgSM1oMyqq5H86ft8podpfV_JcMZ6Gfi?usp=drive_link
	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Renstra 2025-2029	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1xgSM1oMyqq5H86ft8podpfV_JcMZ6Gfi?usp=drive_link
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Renstra 2025-2029	80%	83%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1UB8hJryfMRvkSk39GxyckGu1sL9lEZHt?usp=drive_link
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Renstra 2025-2029	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	https://drive.google.com/file/d/1Pj2VUazyp-jOdyNr_hyq_BVVCkF8idwX/view?usp=drive_link
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang	Renstra 2025-2029	12 Lembaga	1 Lembaga	8,33%	https://drive.google.com/drive/folders/1zccbErJFQ3UWpOsqlRsZDnapZ1UWtEpu?usp=drive_link
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Renstra 2025-2029	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	https://drive.google.com/drive/folders/16dt1w2mmpIpWxNhEfrUVrVYc5mCEuGga?usp=drive_link
	Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah kegiatan	Renstra	2	2	100%	https://drive.google.com/driv

	Kelurahan	pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	2025-2029	Kegiatan	Kegiatan		e/folders/1Omyli4yfkhBzIf7DL2u48VTXZziQJAVB?usp=sharing
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Renstra 2025-2029	6 Unit	6 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1qmpRQxty_BCNe1njKoc3Tz-w6SuMeN0z?usp=drive_link
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Renstra 2025-2029	12 Pokmas	1 Pokmas	8,33 %	https://drive.google.com/drive/folders/1lr76XLoEzoxKd2Fdk9Nnk479Lwok7Vvr?usp=sharing
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan keertiban umum yang dilaksanakan	Renstra 2025-2029	90%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gRKydwnv0lrc-7tiuXYat_Cp9SEOKmye?usp=drive_link
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	Renstra 2025-2029	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/11Iho_UvB_tN59ZG2EP4442fyHUq3nWmq?usp=sharing
	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	Renstra 2025-2029	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ghWsUYCQHvP9EKT1i9Dr_vmCEbHsqY3W?usp=drive_link
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	Renstra 2025-2029	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1O6WlsxQr-RACnnwJ4Mgt1uBvzLiy6puo?usp=sharing
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	Renstra 2025-2029	4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	75 %	https://drive.google.com/drive/folders/175KP9Kp3R7wXeZYfHjH1-mJBGF7pHHaL?usp=drive_link
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Renstra 2025-2029	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1M1Estb_SI4hIV9aCs31ZGJ2pqqsEdfvx?usp=drive_link

	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang					
6	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM PEMERINTAHAN DESA**	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Renstra 2025-2029	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ChniWdylCebz7tWA_4m7ohLIpeP87H0l?usp=sharing
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Renstra 2025-2029	12 Laporan	3 Laporan	25 %	https://drive.google.com/drive/folders/1C58HyXue7m9YbZyUxf3CbenIIZhko4W0?usp=sharing
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Renstra 2025-2029	9 Dokumen	1 Dokumen	11,11 %	https://drive.google.com/drive/folders/1nPfp5S3H6Dphzh0NvLo_Ave2dA76_XhA?usp=sharing
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegitan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Renstra 2025-2029	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1hpQ_fcnodKjPpvUxyqo0IcIF21HjYOgE?usp=drive_link
	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Renstra 2025-2029	3 Dokumen	2 Dokumen	66,66 %	https://drive.google.com/drive/folders/1XrHb9IZZH1nO6lXEDieOQz_W1Rxy2H0J?usp=drive_link

TERIMA KASIH